

**SKRIPSI**  
**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**  
**PADA PT. ILHAM TONANG ALMANTIQ**  
**DUMAI**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mengikuti ujian oral comprehensive  
Sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru



**OLEH:**  
**RIFA YANI**  
**10973005723**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2013**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA PT. ILHAM TONANG ALMANTIQ**

**DUMAI**

**OLEH**

**RIFA YANI**  
**10973005723**

*Penelitian ini dilakukan pada PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. Ilham Tonang Almantiq telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yaitu berupa data yang terjadi dan siap dipakai seperti Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta lampiran lain yang mendukung. Adapun permasalahan yang ditemui penulis pada penelitian ini yaitu perusahaan memasukkan biaya entertainment, biaya Pajak Penghasilan pasal 21 sebagai pengurang penghasilan, sedangkan dalam Undang-Undang perpajakan tidak boleh sebagai pengurang. Oleh karena itu, harus adanya koreksi fiskal atas laporan keuangan terhadap laba yang dibuat perusahaan.*

*Dari perhitungan besarnya Pajak Penghasilan PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada laba akuntansi komersial, sehingga terdapat perbedaan pada laba akuntansi komersial. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan oleh PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai belum sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.*

*Kata Kunci : Akuntansi Pajak Penghasilan, Laba / Rugi Akuntansi (Komersial), Laba Rugi Fiskal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas izin dan limpahan rahmat serta kasih sayang\_Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat rahmat diakhir nanti.

Penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran, motivasi, doa, dan materi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. NazirselakuRektor UIN SUSKA Riau, Pekanbaru.
2. BapakDr.MahendraRomus, SP,  
M.EcsolakuDekanFakultasEkonomidanIlmuSosial UIN Sultan SyarifKasim  
Riau Pekanbaru.
3. BapakDonyMartias, SE, MM selakuketuajurusanAkuntansi S1  
FakultasEkonomidanIlmuSosial UIN Sultan SyarifKasim Riau Pekanbaru.
4. Ibu Hesty Wulandari, SE.M.Sc,Ak yang dengan sabar dan keikhlasannya  
memberi motivasi, bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktunya  
sejak awal sampai terselesainya skripsi ini.
5. BapakatauIbudosenpengajar yang  
selalumemberikanilmudannasehatnyadanStaftatausahaFakultasEkonomidanIl  
musosial UIN SUSKA Riau, Pekanbaru.

6. Bapak Pimpinandirektur dan Istri beserta staf PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data-data untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda Amrin Husin dan Ibunda Rodiah yang tercinta dengan sangat ikhlas memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, dan untaian do'a yang tidak pernah terputus hingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah membalas semuanya. Amin.
8. Abang tercinta Hendri ST, Lukman, Iskandar. Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak Sari Endah Yuni A.Md, dan Juliana S.Sains terimakasih atas nasehat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Adinda Lismaneti, Nurhafizoh, dan Riza. Terimakasih telah memotivasi penulis sampai skripsi ini terselesaikan.
11. Buat sahabat Ku tersayang bang Ryan Joza, Ayu, Mira, susi, terimakasih telah memotivasi penulis sampai skripsi ini terselesaikan.
12. Teman-teman Akuntansi lokal B, seska, dona, ony, nuri, ulfat, tari, dan teman seperjuangan lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk persahabatan yang indah selama menjalani perkuliahan dan teman di jurusan Akuntansi '09 dan semua teman KKN Kec. Sei. Apit kab. Siak.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari dan memahami bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, tapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya. Akhir kata penulis mendo'akan semoga kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat terhadap penulis di Ridhoi dan di terima oleh Allah SWT sebagai amal shaleh. Amin...

Pekanbaru, Juni 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
<b>II. TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Akuntansi.....	8
2.1.1. Pengertian Akuntansi .....	8
2.2. Laporan Keuangan.....	8
2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan.....	8
2.2.2 Komponen Laporan Keuangan.....	10
2.3. Perpajakan.....	10
2.3.1 Pengertian Pajak.....	10
2.3.2 Fungsi Pajak.....	11
2.3.3 Pajak Penghasilan.....	12
2.3.4 Subjek Pajak.....	12
2.3.5 Objek Pajak.....	15
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan.....	20

2.4. Akuntansi Pajak.....	21
2.4.1 Biaya-biaya Yang Diperkenankan Sebagai Pengurang (Deductible Expenses).....	21
2.4.2 Biaya-biaya Yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang(Non Deductible Expenses).....	25
2.4.3 Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan.....	27
2.4.4 Pengelompokkan Aset Tetap Tidak Berwujud dan Tarif Amortisasi .....	28
2.5. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	36

### **III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

3.1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	38
3.2. Aktivitas Perusahaan .....	38
3.3. Struktur Organisasi.....	39

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan.....	42
4.1.1 Pendapatan.....	44
4.1.2 Beban .....	44
4.2. Koreksi-Koreksi Yang Dilakukan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	45
4.3. Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	48
4.4 Perhitungan Laba Rugi Setelah Koreksi.....	50
4.4.1 pajak penghasilan pada perhitungan laba rugi .....	50

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran.....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I Latar Belakang**

Peranan pajak sebagai penerimaan bagi negara merupakan sumber utama yang masih sangat potensial untuk ditingkatkan agar penerimaan dari pajak mampu memenuhi seluruh pembiayaan bagi negara, terutama pada pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo,2011).

Perpajakan di Indonesia sekarang ini menganut sistem *self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada



ditangan Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum juga memberikan fasilitas mudah dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Subjek Pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh Penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Pihak Wajib Pajak berusaha agar laporan keuangan yang disajikan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sedapat mungkin laba bersihnya kecil. Sementara pihak pemerintah dalam hal ini fiskus (pemungut pajak) cenderung melihat laporan keuangan yang disajikan oleh Wajib Pajak sedapat mungkin mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian penyesuaian ini disebut dengan istilah koreksi fiskal.

PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang jasa sebagai suplier minyak BBM. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan tersebut menyusun laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial, sementara dalam peraturan perpajakan, laporan keuangan harus disusun khusus yang disebut dengan laporan keuangan fiskal.

Pada PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai, terdapat beberapa masalah yang terkait dalam laporan keuangan dan seharusnya tidak sebagai pengurangan penghasilan, masalah tersebut adalah: 1) perusahaan memasukkan biaya entertainment sebesar Rp 20.000.000,00 sebagai pengurangan penghasilan, sesuai dengan SE Dirjen Pajak No. 27 tahun 1986 biaya tersebut pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi Wajib Pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT Tahunan. Dari laporan SPT pada PT. Ilham Tonang Almantiq ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Ilham Tonang Almantiq harus melakukan koreksi fiskal positif. 2) Perusahaan memasukkan biaya Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp 210.000,00, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) tidak boleh dimasukkan kedalam perhitungan kena pajak, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. 3) Perusahaan melakukan penyusutan aktiva tetap tetapi karena adanya perbedaan tarif penyusutan menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan. Tarif penyusutan menurut perusahaan untuk kelompok I dan II adalah 12,5%, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan untuk kelompok I adalah

25% dan untuk kelompok II adalah 12,5%. Sehingga menyebabkan biaya penyusutan menurut perusahaan lebih kecil.

Dengan adanya masalah tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian yang ruang lingkupnya sebatas permasalahan yang dibahas yang kemudian lebih lanjut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA PT. ILHAM TONANG ALMANTIQ DUMAI”.

## **I.2 Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“ Apakah Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. Ilham Tonang Almantiq telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. Ilham Tonang Almantiq telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

- a) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan
- b) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan sebagaimana praktek penerapan Undang-Undang perpajakan di PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai.
- c) Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya

## **I.5 Metode Penelitian**

Dalam penulisan laporan penelitian penulis berupaya mengumpulkan bahan, data dan informasi guna terwujudnya kelengkapan dan kebenaran dalam penulisan laporan penelitian.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Gg. Tunas Baru Bagan Besar Dumai.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang terjadi dan siap dipakai seperti Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta lampiran lain yang mendukung, dengan sumber data diperoleh dari bagian akuntansi dan bagian keuangan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, SPT dan SSP.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa data dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang sehubungan dengan perpajakan yang dibutuhkan untuk penelitian.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif*, yaitu dari implementasikan data yang dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa dan selanjutnya data diolah serta membandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan teori-teori yang sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Agar mudah dimengerti dalam penulisan, penulis membagi penulisan dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi atas sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, peumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini menguraikan kerangka teoritis mengenai Akuntansi dan Perpajakan sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini akan membahas tinjauan teoritis mengenai Akuntansi dan Perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, meliputi definisi Akuntansi, Tujuan Laporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Pajak Penghasilan, Subjek Pajak, Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak, Objek Pajak, Yang Tidak Termasuk Objek Pajak, Tarif Pajak Penghasilan, Biaya-Biaya Yang Diperkenankan Sebagai Pengurang, Biaya-Biaya Yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang, Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan, Pengelompokkan Aset Tetap

Tidak Berwujud dan Tarif Amortisasi, serta Pajak Dalam Pandangan Islam.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, aktifitas perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV : Bab ini penulis mencoba memberikan hasil penelitian dan pembahasan dengan cara membandingkan teori yang dibahas dengan praktek yang diterapkan oleh perusahaan.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atau hasil penelitian yang telah dilakukan yang mungkin berguna bagi perusahaan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Kieso (2008), Akuntansi (accounting) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Hongren (2007), Akuntansi (accounting) adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambilan keputusan.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informassi yang bersifat finansial kepada siapa saja yang memerlukan data informasi tersebut. Dengan demikian akuntansi dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang sifatnya lebih luas dari pada teknik-teknik pencatatan semata.

#### **2.2 Laporan Keuangan**

##### **2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 (Financial Accounting Standard Board/FASB:1978) adalah :

- 1) Menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur serta pihak-pihak lain untuk pembuatan keputusan investasi, kredit dan keputusan lainnya yang bersamaan.
- 2) Menyediakan informasi guna membantu investor, kreditor, dan penggunaan lainnya dalam menilai jumlah, ketepatan waktu dan ketidakpastian atas deviden atau bunga dari penjualan, atau dari saham atau hutang.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi perusahaan, klain atas sumber-sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan mentransfer sumber pada perusahaan lain dan pemilik saham), efek transaksi, peristiwa dan hal-hal yang mengubahnya.

Tujuan umum laporan keuangan (Mahmud dan Halim, 2005) yaitu:

- 1) Menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan
- 2) Menyediakan informasi untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakai eksternal
- 3) Menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan
- 4) Menyediakan informasi mengenai sumberdaya ekonomi dan klaim terhadap sumberdaya tersebut
- 5) Menyediakan informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponennya
- 6) Menyediakan aliran kas



### **2.2.2 Komponen Laporan Keuangan**

#### **1) Laporan Laba rugi**

Laporan laba rugi (income statement) yaitu menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode waktu tertentu.

#### **2) Laporan Ekuitas Pemilik**

Laporan ekuitas pemilik (owner's equity statement) yaitu merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode tertentu .

#### **3) Neraca**

Neraca (balance sheet) yaitu melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu.

#### **4) Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas (statement of cash flows) yaitu merangkum seluruh informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan-penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran-pembayaran) untuk periode tertentu.

## **2.3 Perpajakan**

### **2.3.1 Pengertian Pajak**

Menurut Zain (2005,7) Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi pendapatan anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2009), memberikan definisi pajak sebagai berikut:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.3.2 Fungsi Pajak**

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

#### **a) Fungsi Budgetair (penerimaan)**

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### **b) Fungsi Regularend (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2.3.3 Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Resmi (2011), adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Supramono (2010), Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Dengan disahkan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, maka untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan mulai 1 Januari 2001 ada 4 Undang-Undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1994
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2000
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008

### **2.3.4 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Ada pun yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek pajak orang pribadi
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek pajak badan
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
    - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk Subjek pajak adalah:

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.3.5 Objek Pajak**

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

- c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
- d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
- e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek pajak adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau

Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- b) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
- i. Bagian laba yang diterima atau oleh diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
  - b) sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia

- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan

Untuk mendapatkan PPh tahunan yang terutang, Penghasilan Kena Pajak harus dikalikan dengan tarif pasal 17 yaitu:

- 1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

**Tabel II.1 : Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif pajak</b>
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%

di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen) dari laba bersih. Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

## **2.4 Akuntansi Pajak Penghasilan**

### **2.4.1 Biaya-Biaya Yang Diperkenankan Sebagai Pengurang (Deductible Expenses)**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut:
  - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain:
    - a) Biaya pembelian bahan;
    - b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - c) Bunga, sewa, dan royalti;
    - d) Biaya perjalanan;

- e) Biaya pengolahan limbah;
- f) Premi asuransi biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Biaya administrasi;
- h) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
  - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

d) Syarat pada huruf c) tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Biaya entertainment;

Biaya entertainment sering juga dibuat dengan biaya representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen Pajak No. 27 tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan

syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wajib Pajak harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti yang berisi:

- 1) Nomor urut
- 2) Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
- 3) Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
  - a. Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - b. Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - c. Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
- 4) Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan:
  - a. Nama
  - b. Posisi
  - c. Perusahaan
  - d. Jenis usaha

**Tabel II.2**  
**Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Sejenisnya**  
**Tahun Pajak 2011**

No	Pemberian Entertainment dan Sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan Entertainment dan sejenisnya			Ket
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	

#### 2.4.2 Teori Nominatif

##### a. Pengertian Daftar Nominatif

Daftar Nominatif adalah daftar rincian yang memuat nama-nama penerima uang, jumlah uang, dan rincian lainnya atas perjalanan dinas dan sebagainya secara kolektif.

##### b. Daftar Nominatif Dalam Perpajakan

Dalam kaitannya dengan administrasi perpajakandaftar nominatif adalah daftar nama dan identitas Pengurus, Komisaris Pemegang Saham/ Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum PTKP



dan belum ber-NPWP penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan dibawah PTKP.

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,
- (3) Kepada Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

#### **2.4.3 Biaya-Biaya Yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang (Non Deductible Expenses)**

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008 adalah:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang;
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i samapai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan atau sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham ;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

#### **2.4.4 Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan**

Menurut pasal 11 ayat (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah

yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Pengelompokan aktiva tetap berwujud untuk perhitungan penyusutan berdasarkan pasal 11 ayat (6) UU PPh, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan Harta Tetap Berwujud, keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/ KMK.04/ 1995 Tanggal 7 Februari 1995 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis Harta Berwujud yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 520/ KMK.04/ 2000 Tanggal 14 Desember

2000 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/ KMK.03/ 2002

Tanggal 8 April 2002 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel II.4: Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok  
IKeputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dan bangunan.</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/ pembukuan, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/ cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (tool) bagi industri/ jasa yang bersangkutan</p> <p>f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman</p> <p>g. Dies, Jigs dan Mould</p>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecahan kulit, penyosoh, pengering, pullet dan sejenisnya.

4	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, write machine, bipolar test system, eliminatio (PE8-1) pose checker.</i>

Sumber : Waluyo,2011:17

**Tabel II.5 : Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 2**  
**Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat, dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/ perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin,

		<p>penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan /memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</p>
4	Mesin industri	Mesin yang menghasilkan /memproduksi mesin ringan misalnya mesin jahit, pompa air.
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakannya seperti truk berat, dump, truk, crane bulldozer, dan sejenisnya.
7	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkan dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misal gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p>

8	Telekomunikasi	<p>c. Kapal yang dibuat khusus untu mengehela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadaman kebakaran, kapan keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang memuat berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon</p> <p>a. Perangkat pesawat telepon</p> <p>b. Pesawat, telegraf, termasuk pesawat pengiriman, dan penerimaan dari radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri semi konduktor	<p><i>Auto frame leader, automatic logic handler, baking over, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, cutting oven, cutting press, dombar cut machine, dicer, die bamder, die shear test, dynamic burn in system oven, dinamic test handler elimination (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker.</i></p>

Sumber :Waluyo,2011:175-176



**Tabel II.6 : Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 3**

**Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah /menghasilkan produk-produk tekstil, misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule.</p> <p>b. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk kayu, barang-barang dari jemari, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin dan peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia, misalnya bahan kimia organis, persenyawaan organis, dan anorganis dari logam mulia, elemen radioaktif, isotop, bahan kimia organis dll.</p> <p>b. Mesin yang mengolah /menghasilkan produk industri lainnya. Misalnya dammar</p>

		<p>tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet.</p>
5	Industri mesin	<p>Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil, mesin kapal.</p>
6	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan dan sejenisnya) termasuk kapal pendinginan dan kapal tangki, kapal menangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	<p>Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.</p>

Sumber : Waluyo,2011:177-178

**Tabel II.7 : Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 4**  
**Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Perhubungan dan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokomotif uap dan tender atas rel</li> <li>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar</li> <li>c. Lokomotif atas rel lainnya</li> <li>d. Karet, gerbong penumpang dan barang termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkut.</li> <li>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tabung dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</li> <li>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal, suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</li> <li>g. Dok-dok terapung.</li> </ul>

Sumber : Waluyo,2011:178-179

#### 2.4.4 Pengelompokan Aset Tetap Tidak Berwujud dan Tarif Amortisasi

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel II.8 : Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi**

<b>Kelompok Harta Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>	<b>Tarif Amortisasi</b>	
		<b>Garis Lurus</b>	<b>Saldo Menurun</b>
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Undang-Undang No 36 Tahun 2008

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi diatas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Kemungkinan dapat terjadi masa manfaat aset tetap tidak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat, sehingga Wajib Pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

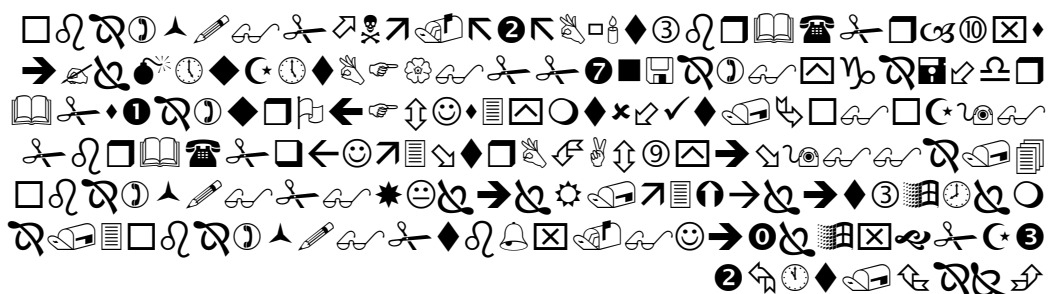
## 2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyra atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”, atau juga bisa disebut Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Alasan keharusan muslim menunaikan kewajiban pajak yang diterapkan oleh negara, disamping menunaikan kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan tolong menolong antara kaum muslimin dan umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dari dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dari Fatimah binti Qayis. Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya dalam harta kekayaan ada kewajiban lain diluar zakat”.

Allah berfirman dalam surat Qs. An-Nissa’ ayat 58:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An-Nisaa' : 58).



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Ilham Tonang Almantiq didirikan berdasarkan akta pendirian No. 18 tanggal 09-10-2006, yang dibuat dihadapan H. Ismail, SH notaris Dumai dan telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 13-11-2006 dengan No. W4-00113 HT.01.01 Tahun 2006. Terhadap akte tersebut menurut keterangannya sampai saat ini belum pernah diubah.

#### **3.2 Struktur Organisasi**

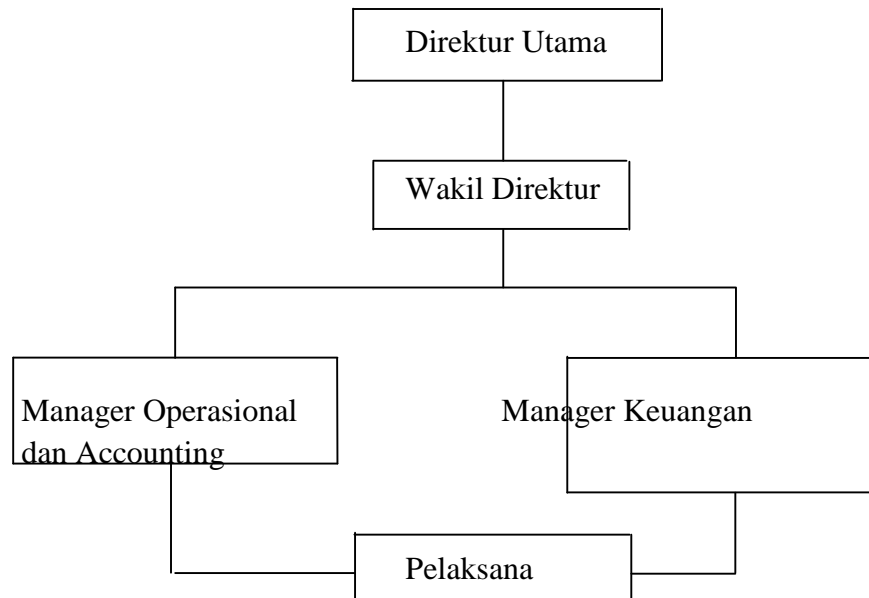
Suatu organisasi perusahaan sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan dan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi perusahaan ini membantu manajemen perusahaan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan seluruh komponen perusahaan dapat mengetahui seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga kelancaran operasional perusahaan dapat terjamin.

Untuk mengetahui bentuk struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Ilham Tonang Almantiq, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar III.I**  
**Struktur Organisasi**  
**PT. Ilham Tonang Almantiq**



Sumber: PT. Ilham Tonang Almantiq

Berdasarkan struktur organisasi yang disajikan perusahaan, maka dapat diketahui tugas dan tanggung jawab pada tiap-tiap bagian yang ada yaitu sebagai berikut:

a. Direktur utama

- 1) Menyusun laporan bulanan atau tahunan tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer
- 3) Menyusun rencana kerja yang ada diusulkan kepada komisaris

- 4) Berhak dan berwenang untuk dan atas nama komisaris serta mewakili perusahaan

b. Wakil Direktur

- 1) Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan
- 2) Melakukan pendelagasian tugas sesuai pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh manejer
- 3) Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan sehubungan masalah administrasi dan umum serta masalah kepegawaian
- 4) Mengambil keputusan tentang hal yang berhubungan dengan administrasian dan kepegawaian

c. Manager Operasional

- 1) Ikut serta team pembuat buku biru
- 2) Menyiapkan bahan rapat dan membuat laporan biaya
- 3) Melakukan perencanaan, perhitungan dan proses penagihan eskalasi dari pekerjaan yang dilaksanakan
- 4) Menjaga kelancaran pekerjaan sesuai dengan tugasnya

d. Manager keuangan dan accounting

- 1) Terselenggaranya kegiatan pembukuan diperusahaan
- 2) Tersedianya laporan keuangan
- 3) Terlaksananya sistem pengarsipan dokumen akuntansi
- 4) Tersedianya dana bagi kepentingan perusahaan dan proyek
- 5) Menerima dan memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas dan bank serta melaksanakan seluruh proses akuntansi

- 6) Menyimpan semua bukti kas dan bank beserta lampirannya secara sistematis ditempat yang aman

e. Pelaksana

Bertugas sebagai pekerjaan yang terlibat langsung dengan pekerjaan yang ada, sebagai pelaksana harus diperhatikan kesungguhan dalam bekerja.

### **3.3 Aktivitas Perusahaan**

Berdasarkan akta pendirian perusahaan, bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau baik atas tanggungan sendiri maupun atas dasar komisi
2. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor, kendaraan motor dll.
3. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan, perencanaan pekerjaan dengan melaksanakan bermacam-macam pekerjaan
4. Menjalankan usaha dalam bidang teknik
5. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan
6. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan**

Laporan laba rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu laporan yang disajikan oleh perusahaan yang berfungsi mengukur kinerja keuangan selama satu periode tertentu. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan aktivitas pendapatan yang dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan upaya memperoleh pendapatan yang bersangkutan.

Sedangkan perhitungan netto fiskal menurut Undang-Undang perpajakan dihitung dengan cara laba/ rugi komersial ditambah dengan koreksi fiskal positif dikurangi dengan koreksi fiskal negatif. Penghasilan netto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Besarnya pajak terhutang adalah tarif PPh pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak yaitu untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih.

Berikut ini penulis akan membahas komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi PT. Ilham Tonang Almantiq periode 31 Desember 2011 pada tabel IV.1 sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Rincian Laba Rugi**  
**PT. Ilham Tonang Almantiq**  
**Periode 31 Desember 2011**

<b>Pendapatan</b>	
Penjualan	Rp 18.583.855.685,00
Pendapatan dari sewa kendaraan	Rp 458.500.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 19.042.355.685,00</b>
Harga Pokok Penjualan	Rp (17.363.104.685,00)
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp 1.679.251.000,00</b>
Biaya Operasi	Rp (1.538.474.716,00)
<b>Laba Bersih</b>	<b>Rp 140.776.284,00</b>

Sumber : PT. Ilham Tonang Almantiq

Berdasarkan laporan laba rugi diatas maka perhitungan atas pajak penghasilan (PPh) yang terhutang untuk tahun 2011 dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Perpajakan yaitu:

Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih.

Laba bersih sebelum pajak yang diperoleh perusahaan yaitu Rp 140.776.284,00. Dari perhitungan diatas maka diperoleh jumlah pajak yang terhutang sebesar Rp 140.776.284,00.

$$\text{Rp } 140.776.284,00 \times 25\% = \text{Rp } 35.194.071,00$$

Jadi, jumlah pajak yang seharusnya terhutang menurut laporan komersial adalah Rp 35.194.071,00

#### **4.1.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberi jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari satu kesatuan (Hendriksen, 2003).

Pendapatan usaha merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dalam tahun 2011 yaitu Rp 19.042.355.685,00 angka ini yang merupakan sumber penghasilan yang utama bagi perusahaan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Pendapatan sebesar Rp 19.042.355.685,00 masih merupakan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama periode 2011 sebagaimana yang telah disajikan dalam laporan laba rugi PT. Ilham Tonang Almantiq periode Januari s/d Desember 2011.

#### **4.1.2 Beban**

PT. Ilham Tonang Almantiq dalam menentukan besarnya beban, perusahaan ini tidak melakukan penyesuaian menurut komersial dan menurut fiskal, sehingga menyebabkan perbedaan perhitungan antara laba menurut perusahaan dengan laba menurut ketentuan perpajakan. Berikut ini uraian dari bermacam-macam beban operasional yang disajikan dalam laporan laba rugi PT. Ilham Tonang Almantiq periode Januari sampai dengan Desember 2011 pada tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Rincian Beban-Beban**  
**PT. Ilham Tonang Almantiq**  
**Periode yang Berakhir 31 Desember 2011**

<b>Beban-beban:</b>	
Biaya gaji karyawan	Rp 902.394.100,00
Biaya Jamsostek	Rp 24.121.241,00
Biaya Listrik	Rp 17.175.000,00
Biaya Telepon	Rp 31.096.000,00
Biaya Perlengkapan/ ATK	Rp 16.570.000,00
Biaya Penyusutan Inventaris	Rp 190.113.375,00
Biaya Kir dan Pajak Mobil	Rp 11.753.000,00
Biaya Pembelian Peralatan Mobil	Rp 66.850.000,00
Biaya Perawatan Kendaraan	Rp 46.242.000,00
Biaya Pembelian BBM	Rp 107.850.000,00
Biaya Perjalanan Dinas/ Transportasi	Rp 104.100.000,00
Biaya Entertainment	Rp 20.000.000,00
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 210.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>Rp 1.538.474.716,00</b>

Sumber : PT. Ilham Tonang Almantiq

#### **4.2 Koreksi-koreksi Yang dilakukan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Berdasarkan laporan laba rugi yang disajikan perusahaan terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, ketidaksesuaian tersebut antara lain:

##### **1. Biaya Entertainment**

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebesar Rp 20.000.000,00 sebagai pengurangan penghasilan. Biaya entertainment sering juga dibuat dengan biaya representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf n tersebut adalah dengan SE Dirjen Pajak No. 27 tahun 1986 pembebanan biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya, akan tetapi Wajib Pajak harus membuat daftar nominatif dalam Surat Pemberitahuan Tahunan seperti berikut:

- 1) Nomor urut
- 2) Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
- 3) Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
  - a. Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - b. Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - c. Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
- 4) Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan:
  - a. Nama
  - b. Posisi
  - c. Perusahaan
  - d. Jenis usaha (Muljono, 2009)

Dari laporan Surat Pemberitahuan PT. Ilham Tonang Almantiq ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif tersebut. Oleh karena itu, PT. Ilham Tonang Almantiq harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 20.000.000,00.



## 2. Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam laporan laba rugi dapat juga dilihat bahwa PT. Ilham Tonang Almantiq memasukkan biaya Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp 210.000,00 sebagai pengurangan penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf h tersebut adalah Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan pasal 21 tidak boleh dimasukkan kedalam Perhitungan Kena Pajak, karena akan menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu, PT. Ilham Tonang Almantiq harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 210.000,00.

## 3. Biaya Penyusutan

Untuk penentuan besarnya penyusutan aktiva tetap tarif dan masa manfaat harus berdasarkan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan yaitu harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud dan tidak berwujud yang digunakan oleh perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat disusutkan secara garis lurus maupun saldo menurun (Ilyas, 2007). Dari daftar penyusutan aktiva tetap PT. Ilham Tonang Almantiq dapat dilihat adanya perbedaan tarif penyusutan menurut perusahaan dengan tarif menurut fiskal. Tarif penyusutan menurut perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu kelompok I dan kelompok II adalah 12,5%, sedangkan penyusutan menurut fiskal untuk kelompok I adalah 25% dan kelompok II adalah 12,5%. Akibat adanya perbedaan tarif penyusutan tersebut maka perhitungan yang lebih jelas biaya penyusutan aktiva tetap menurut perusahaan

lebih kecil sebesar Rp 2.300.875,00. Dibawah ini penulis akan melakukan koreksi atas perhitungan penyusutan aktiva tetap, dapat dilihat pada tabel IV.3.

**Tabel IV.4**  
**Daftar Perhitungan Penyusutan Menurut Perusahaan**  
**dan Menurut Undang-Undang Perpajakan**

<b>Keterangan</b>	<b>Harga Pokok</b>	<b>Menurut Perusahaan</b>		<b>Menurut UU Perpajakan</b>		<b>Selisih</b>
Filling Cabinet	1.500.000	187.500	12,5%	375.000	25%	187.500
Laptop	9.000.000	1.125.000	12,5%	2.250.000	25%	1.125.000
Printer	850.000	106.250	12,5%	212.500	25%	106.250
ATK	1.057.000	132.125	12,5%	264.250	25%	132.125
Kulkas Mini	1.500.000	187.500	12,5%	375.000	25%	187.500
Kursi Kantor	500.000	62.500	12,5%	125.000	25%	62.500
Meja Kantor	3.500.000	437.500	12,5%	875.000	25%	437.500
Dispenser	150.000	18.750	12,5%	37.500	25%	18.750
Mesin TIK	350.000	43.750	12,5%	87.500	25%	43.750
<b>Jumlah</b>		<b>2.300.875</b>		<b>4.601.750</b>		<b>2.300.875</b>

Sumber : Data Olahan

#### **4.3 Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Dibawah ini penulis akan membuat laporan koreksi fiskal atas laporan komersial yang dibuat oleh PT. Ilham Tonang Almantiq.

**Tabel IV.5**  
**Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi**  
**PT. Ilham Tonang Almantiq**

<b>Keterangan</b>	<b>Laporan Komersial</b>	<b>Koreksi Positif</b>	<b>Koreksi Negatif</b>	<b>Laporan Fiskal</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 19.042.355.685</b>			<b>Rp 19.042.355.685</b>
<b>HPP</b>	<b>Rp 17.363.104.685</b>			<b>Rp 17.363.104.685</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp 1.679.251.000</b>			<b>Rp 1.679.251.000</b>
<b>Beban-Beban</b>				
Biaya Gaji karyawan	Rp 902.394.100			Rp 902.394.100
Biaya jamsostek	Rp 24.121.241			Rp 24.121.241
Biaya Listrik	Rp 17.175.000			Rp 17.175.000
Biaya Telepon	Rp 31.096.000			Rp 31.096.000
Biaya Perlengkapan/ATK	Rp 16.570.000			Rp 16.570.000
Biaya Penyusutan	Rp 190.113.375		Rp 2.300.875	Rp 190.113.375
Investaris				
Biaya Kir dan Pajak Mobil	Rp 11.753.000			Rp 11.753.000
Biaya Pembelian Peralatan	Rp 66.850.000			Rp 66.850.000
Mobil				
Biaya Perawatan Kendaraan	Rp 46.242.000			Rp 46.242.000
Biaya Pembelian BBM	Rp 107.850.000			Rp 107.850.000
Biaya Perjalanan Dinas/ Transportasi	Rp 104.100.000			Rp 104.100.000
Biaya Entertainment	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000		Rp 20.000.000
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 210.000	Rp 210.000		Rp 210.000
<b>Total Beban</b>	<b>Rp (1.538.474.716)</b>			<b>Rp(1.520.565.591)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 140.776.284</b>			<b>Rp 158.685.409</b>
<b>pajak</b>	<b>Rp (35.194.071)</b>			<b>Rp (39.671.352)</b>
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>Rp 105.582.213</b>			<b>Rp 119.014.057</b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil koreksi fiskal diatas, terjadi kenaikan laba sebelum pajak dari Rp 140.776.284 (laporan komersial) menjadi Rp 158.685.409. Sehingga terjadi kenaikan pada Pajak Penghasilan badan yang harus dibayar dari Rp 35.194.071,00 menjadi Rp 39.671.352,00. Dengan demikian, perhitungan Pajak Penghasilan badan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Rp 158.685.409,00

Pajak yang terhutang:

$\text{Rp } 158.685.409,00 \times 25\% = \text{Rp } 39.671.352,00$

Jadi, jumlah pajak yang seharusnya terhutang dibayar oleh perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 39.671.352,00.

#### **4.4 Perhitungan Laba Rugi Setelah Koreksi**

##### **4.4.1 Pajak Penghasilan Pada Perhitungan Laba Rugi**

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa dalam melaksanakan akuntansi Pajak Penghasilan PT. Ilham Tonang Almantiq, ternyata pihak perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penyusunan laporan laba rugi yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan yang dihitung perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, laporan perhitungan laba rugi yang disusun oleh PT. Ilham Tonang Almantiq harus dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya-biaya yaitu biaya entertainment, biaya pajak penghasilan pasal 21 dan biaya akumulasi penyusutan. Dengan adanya penyesuaian tersebut, mengakibatkan jumlah beban pajak meningkat, untuk penjelasannya penulis sajikan perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah koreksi fiskal sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah**  
**koreksi fiskal**

<b>Keterangan</b>	<b>Laporan Komersial</b>	<b>Laporan Fiskal</b>	<b>Beda</b>
Laba sebelum pajak	Rp 140.776.284	Rp 158.685.409	Rp 17.909.125
Beban pajak	Rp 35.194.071	Rp 39.671.352	Rp 4.477.281
Laba bersih setelah pajak	<b>Rp 105.582.213</b>	<b>Rp 119.014.057</b>	<b>Rp 13.431.844</b>

Sumber: Data Olahan

Dari uraian diatas seharusnya PT. Ilham Tonang Almantiq menyajikan jumlah beban pajak sebesar Rp 39.671.352 dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 119.014.057.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian teoritis antara pembahasan pada bab sebelumnya, maka bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran pada PT. Ilham Tonang Almantiq Dumai.

#### **5.1 Kesimpulan**

- 1) Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan belum dapat dapat dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.
- 2) Dari laporan perhitungan laba rugi dapat dilihat jumlah laba yang diperoleh perusahaan belum diadakan koreksi fiskal, karena laba yang disajikan tersebut adalah laba komersial yang tentunya memiliki perbedaan dengan laba fiskal.
- 3) Koreksi fiskal dilakukan perusahaan yaitu biaya entertainment sebesar Rp 20.000.000,00, biaya Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp 210.000,00 dan akumulasi penyusutan terdapat selisih sebesar Rp 2.300.875 sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sedangkan didalam Undang-Undang perpajakan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan.

- 4) Sebagai hasil dari koreksi fiskal jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Ilham Tonang Almantiq sebesar Rp 39.671.352,00.

## **5.2 Saran-Saran**

Selain kesimpulan yang penulis kemukakan, penulis juga memberikan saran-saran antara lain:

- 1) Perusahaan diharapkan dapat menerapkan Akuntansi Pajak Penghasilannya dengan baik dan benar.
- 2) Dalam menghitung PPh terhutang sebaiknya perusahaan menggunakan tarif yang sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku dan dalam mencantumkan dan menyetorkan PPh terhutang tersebut perusahaan harus sesuai dengan jumlah pajak yang ada sehingga tidak membingungkan pemakai laporan keuangan tersebut.
- 3) Dalam perpajakan, perusahaan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilengkapi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan serta dilampiri dengan perhitungan laba rugi fiskal untuk mengetahui besarnya pajak terhutang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58

Agoes, Soekrisno dan Estralisa Trisnawati. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 revisi: Jakarta

Financial Accounting Standard Board 1978. Statement Of Financial Accounting Concepts No. 1. Objectives Of Financial Reporting By Business Enterprises

Hanafi, Mahmud M dan Abdul Halim, 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Unit Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN. Yogyakarta.

Harrison, Horngren. 2007. *Akuntansi*, Edisi ketujuh. Jilid 1. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Hendriksen, Eldon S. 2003. *Teori Akuntansi*, Edisi keempat, jilid 1. Erlangga: Jakarta

Kieso, Donald E, Jerry J. Weygrandt, 2007. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Kesepuluh, Jilid Kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta.

\_\_\_\_\_. Donald E, Jerry J. Weygent, Paul D. Kimmel, 2007. *Accounting Principles*. Edisi Tujuh, Buku Satu. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

*Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002*

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi 2009: Yokyakarta.

Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi: Yogyakarta

ResmiSiti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

*SE Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986*

Supromono, 2010. *Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi: Yogyakarta

Suhartono, Rudi dan Wirawan B Ilyas, 2007. *Pajak Penghasilan*, Panduan Komprehensif dan Praktis, Lembaga. Penerbit Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan KeEmpat atas tentang Pajak Penghasilan*

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta



\_\_\_\_\_ 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Erlangga: Jakarta

Zain, Muhammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat:  
Jakarta